

## REALITAS DAN IDEALITAS DALAM REFORMASI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

Oleh: Arif Rohman \*)

### Abstrak

Penyelenggaraan program studi S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) sejak tahun 2002 di beberapa perguruan tinggi Indonesia merupakan hasil terobosan baru. Melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI nomor: 827/D/T/2002 tanggal 3 April 2002 pemerintah mengizinkan penyelenggaraan program ini di sepuluh perguruan tinggi eks IKIP dan FKIP. Hal tersebut dilakukan dalam rangka terwujudnya kualifikasi guru Sekolah Dasar (SD) yang lebih baik yakni menjadi sarjana. Namun realitasnya, penyelenggaraan prodi tersebut masih mengalami banyak kendala antara lain: tidak adanya dosen tetap, minimnya sarana dan prasarana pembelajaran dan laboratorium termasuk sanggar praktek ketrampilan dan perpustakaan, enrolment input terbatas hanya lulusan D-2 PGSD yang telah berstatus mengajar di SD, sebagian masyarakat masih memandang sebelah mata, banyaknya kendala birokrasi dari instansi para mahasiswa berasal, dukungan dari pemerintah daerah rendah. Oleh karenanya, beberapa terobosan strategis perlu dilakukan antara lain dengan

membangun kemitraan kepada semua pihak.

**Kata kunci:** Peningkatan kualifikasi guru SD, kendala lapangan, pembangunan kemitraan.

### Pendahuluan

Kebijakan *Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun* yang telah diimplementasikan sejak tahun 1994 secara implisit telah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah menyadari pentingnya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (*human resources*). Yakni peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pemberian fasilitas dan layanan pendidikan bagi seluruh warga untuk mendapatkan pengalaman pembelajaran minimal selama sembilan tahun. Formulasi dan implementasi kebijakan tersebut oleh pemerintah dimaksudkan sebagai upaya antisipatif dalam menghadapi tuntutan keadaan masa depan yang menurut Alvin Toffler (1986) dinyatakan sebagai kompleks (*complex*) dan sulit diduga (*unpredictable*).

Banyak ahli memprediksikan bahwa kehidupan mendatang akan ditandai sebagai masyarakat informasi dengan dominasi

---

\*) Arif Rohman adalah dosen pada jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan FIP UNY

sektor jasa dan industri pengolahan dalam lingkungan masyarakat global yang menuntut keterbukaan (*openness*), kemampuan menjalin hubungan kerjasama dan persaingan (*cooperation dan competition*) secara tepat namun tetap memiliki identitas nasional (*national identity*). Kondisi masyarakat mendatang tersebut hanya akan dapat dihadapi dengan baik oleh manusia dan masyarakat dengan kemampuan dasar yang generik dan *adaptable* untuk menghadapi masyarakat yang senantiasa berubah secara cepat.

Sehubungan dengan hal tersebut UNESCO telah mengantisipasi fenomena tersebut dengan mencanangkan program pendidikan untuk semua (*education for all*). Dalam hal ini semua anak di semua bangsa di dunia wajib mendapat pelayanan pendidikan secara merata tanpa membedakan jenis kelamin, ras, dan agama. Oleh karenanya, UNESCO memperkenalkan adanya empat pilar pendidikan global yaitu *learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together* yang berlangsung melalui hubungan-hubungan *formal, informal, dan nonformal*. Singkatnya pendidikan meliputi kegiatan belajar pengetahuan, ketrampilan, pengembangan kepribadian, dan hidup bermasyarakat.

Dengan mencermati tuntutan yang telah digariskan UNESCO di satu sisi serta tekap bangsa Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di sisi yang lain, maka pemenuhan kebutuhan pendidikan untuk seluruh masyarakat Indonesia sangat penting artinya terutama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan dimulai dengan Pendidikan Dasar minimum sembilan tahun. Pendidikan Dasar sembilan

tahun bagi anak-anak Indonesia diartikan sebagai kesempatan mengenyam pendidikan sekolah bagi anak-anak Indonesia tersebut setara Sekolah Dasar (SD) enam tahun dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) tiga tahun yang membutuhkan dukungan jaminan proses yang aman, terbuka, demokratis, efisien, dan berkualitas.

Sejalan dengan perkembangan tersebut pendidikan guru dan tenaga kependidikan lainnya juga dengan sendirinya dituntut mampu menghasilkan lulusan dengan kualitas lebih tinggi dari pada masa sebelumnya. Guru Sekolah Dasar (SD) untuk masa mendatang tidak akan cukup hanya dengan kemampuan sebagai pelaksana teknis pembelajaran saja. Perkembangan masyarakat yang dinamis menuntut adanya guru Sekolah Dasar yang mempunyai profil sebagai ahli pendidikan dasar yang memiliki kemampuan untuk:

- a. Memfasilitasi pembentukan dasar-dasar kepribadian yang kokoh dan cerdas pada anak-anak.
- b. Melakukan tugas pembelajaran literasi pendidikan dasar sebagai alat untuk menguasai ipteks.
- c. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuannya secara kreatif, produktif, dan mandiri dalam sistem informasi yang ada di dalam masyarakat sehingga selalu dapat menampilkan kinerja yang unggul sebagai pendidik.

Ketiga kelompok kemampuan dasar tersebut membutuhkan pendidikan minimum setingkat sarjana (S-1); tidak mungkin dikuasai hanya dengan pendidikan dua

tahun saja setingkat Deploma Dua (D-2). Berdasarkan pokok-pokok pemikiran tersebut maka kehadiran program studi S-1 PGSD di beberapa universitas adalah sesuatu yang tepat. Namun umumnya penyelenggaraan program studi tadi dikesankan masih konvensional. Oleh karenanya, pertanyaan paling urgen adalah bagaimanakah mewujudkan prodi S-1 PGSD yang progresif dan adaptif terhadap aneka tuntutan kemajuan?

### **Perspektif Historis Penyelenggaraan S-1 PGSD**

Program studi S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang sekarang ini diselenggarakan merupakan suatu program yang diawali adanya penyelenggaraan program setingkat diploma yang bernama program studi Deploma-II PGSD. Secara historis program studi D-II PGSD diselenggarakan sejak tahun 1990 dalam rangka untuk memenuhi penyediaan kebutuhan guru Sekolah Dasar usai pembubaran sekaligus integrasi Sekolah Pendidikan Guru (SPG) ke dalam LPTK setingkat perguruan tinggi yang bernama IKIP/ FKIP pada saat itu.

Terbukti dengan telah diselenggarakannya program studi D-II PGSD di beberapa IKIP/ FKIP, ratusan guru Sekolah Dasar dihasilkan oleh lembaga tadi yang sebagian lulusannya telah mengabdikan dirinya di lembaga-lembaga pendidikan yang dituju. Aneka upaya perbaikan terus dilakukan untuk mewujudkan tipologi program studi D-II PGSD yang lebih progresif termasuk melalui program bantuan Due-Like PSGD. Sehingga sampai sekarang praktis penyelenggaraan Program studi D-II PGSD sudah berjalan 13 tahun.

Atas dasar berbagai alasan yang antara lain karena adanya tuntutan kebutuhan lokal, regional, dan global supaya tenaga kependidikan dan tenaga guru khususnya di SD tidak sekedar hanya sebagai pelaksana teknis pembelajaran saja, akan tetapi mereka dituntut mempunyai profil sebagai ahli pendidikan dasar sebagaimana telah sedikit disinggung di muka. Maka mulai pada tahun 2002 di jajaran Dirjend Dikti telah dipikirkan perlunya program studi S-1 PGSD. Dengan melalui surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor: 827/D/T/2002 tanggal 3 April 2002 pemerintah mengizinkan kurang lebih sepuluh perguruan tinggi eks IKIP untuk terlibat dalam penyelenggaraan program studi S-1 PGSD yang sampai sekarang baru berjalan kurang dari dua tahun.

Diantara sepuluh penyelenggara program studi S-1 PGSD tersebut, sebagian ada yang sudah menyelenggarakan pendidikan S-1 PGSD sejak tahun 2000 seperti yang terjadi pada Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam hal ini program studi S-1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta telah menyelenggarakan layanan pendidikan sejak september 2000 yang disebabkan atas permintaan Pemerintah Daerah Propinsi DIY dalam rangka peningkatan kualitas menjadi setaraf sarjana para guru SD lulusan D-II PGSD di propinsi DIY tersebut.

Dalam perspektif yang lebih luas, penyelenggaraan program studi S-1 PGSD yang berpangkal dari surat ijin Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI, secara yuridis dan substantif juga memiliki dasar-dasar yang kokoh yang meliputi:

1. UU Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP Nomor 60 tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi.
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0686/U/1991 dan Nomor 222/U/1998 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
4. Keputusan Mendiknas RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
5. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
6. Paper Suprodjo Pusposutardjo (Direktur Pembinaan Akademik dan Kemaha-siswaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi), "*Analisis Kompetensi Guru SD Berdasarkan Pengelompokan Mata Kuliah Dalam Kurikulum*".
7. Beberapa paper oleh *taskforce* BAPPENAS untuk pembaruan pendidikan nasional, diantaranya: (a) "*Filosofi, kebijakan dasar, dan strategi pendidikan nasional*"; (b) "*Pendidikan tinggi*"; (c) "*Pendidikan guru dan tenaga kependidikan*".

### **Realitas dan Aneka Kendala Obyektif**

Setelah berjalan kurang dari dua tahun lamanya ini atau bahkan ada yang sudah hampir empat tahun seperti yang terjadi di Universitas Negeri Yogyakarta, maka program studi S-1 PGSD bisa dicermati bahkan dinilai banyak pihak baik dari kalangan internal maupun eksternal. Umumnya, realitas yang ada dalam penyelenggaraan program studi S-1 PGSD masih belum meng-

gembirakan. Aneka kekurangan masih banyak dimiliki oleh program studi ini, baik yang menyangkut penyediaan tenaga akademik, pengembangan kurikulum, sarana prasarana yang dimiliki, maupun kondisi input yang kesemuanya masih terbatas.

Beberapa hal yang merupakan kondisi obyektif pada program studi S-1 PGSD umumnya di semua penyelenggara di Indonesia antara lain adalah:

- a. Hampir semua penyelenggara program studi S-1 PGSD belum banyak memiliki dosen tetap yang bisa mendukung penuh terhadap penyelenggaraan program studi S-1 PGSD. Bahkan yang terjadi di UNY, para dosen pengajar pada program studi ini adalah semuanya dari program studi lain alias pinjaman.
- b. Program studi ini masih belum menjadi program studi reguler seperti beberapa program studi lain. Oleh karena masih berstatus non-reguler maka prodi ini dianggap tidak termasuk dalam mata anggaran yang disediakan oleh pemerintah setiap tahunnya dan praktis harus dapat membiayai dirinya tanpa subsidi pemerintah.
- c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana misalnya adanya laboratorium yang memadai khusus untuk program studi ini, sanggar praktek ketrampilan, perpustakaan dengan koleksi yang memadai, dan aneka alat peraga pembelajaran yang kesemuanya masih belum mengembirakan.
- d. Terbatasnya kegiatan proses belajar mengajar yang hanya bisa dilakukan pada waktu siang dan sore hari.

Sehingga program-program dan aneka layanan yang dirancang untuk satu hari menjadi tidak bisa berjalan.

- d. Calon mahasiswa peserta program (*enrollment input*) S-1 PGSD masih sangat terbatas yakni hanya pada mereka yang sudah menjadi guru baik yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun sebagai guru yayasan.
- e. Sebagian masyarakat khususnya golongan menengah ke atas masih memandang sebelah mata terhadap keberadaan program studi ini. Program studi S-1 PGSD dipahaminya hanya menghasilkan lulusan yang nantinya berprofesi sebagai guru SD yang olehnya dipandang kurang bergensi. Sehingga calon mahasiswa masukan program studi ini umumnya berasal dari golongan masyarakat lapisan bawah yang secara kultural kurang memiliki orientasi kosmopolit dan wawasan keunggulan.
- f. Para mahasiswa yang saat ini telah mengikuti program studi S-1 PGSD sering mengalami kendala birokrasi karena tugas-tugas dinas di sekolahnya ataupun kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- g. Program studi ini masih belum menjadi program studi reguler seperti beberapa program studi lain di lingkungan FIP UNY sehingga tidak termasuk dalam mata anggaran yang disediakan oleh pemerintah setiap tahunnya.
- h. Dukungan dari pemerintah daerah terutama dalam memberikan beasiswa SPP kepada mahasiswa S-1 PGSD bersifat tidak tetap lebih-lebih ketika otonomi daerah mulai diberlakukan.

Beasiswa pemda ini menjadi penting, mengingat hampir semua mahasiswa program studi S-1 PGSD saat ini adalah para guru SD milik Pemda yang kesemuanya relatif keberatan untuk dapat membiayai secara penuh dalam menempuh pendidikan di program studi S-1 PGSD ini.

### **Strategi Progresif Pengembangan S-1 PGSD**

Sebagian besar program studi S-1 PGSD yang merupakan salah satu program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan atau jurusan Ilmu Pendidikan berkeinginan menghasilkan tenaga ahli dan/atau professional yang mampu mengembangkan konsep-konsep pendidikan sesuai dengan karakteristik manusia dan budaya masyarakat Indonesia dalam perspektif global.

Untuk mewujudkan hal di atas, maka mereka bersama segenap civitas akademika bertekad untuk melaksanakan banyak hal yang kemudian dikemas menjadi visi dan misi program studi. Salah satu contoh misi pada program studi S-1 PGSD FIP UNY adalah:

- a. Mengembangkan dan memantapkan system kelembagaan fakultas sehingga mampu mendukung kinerja civitas akademika secara sinergis.
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan dan memantapkan konsep-konsep pendidikan sesuai dengan program studi masing-masing (S-1 PGSD).
- c. Mengembangkan budaya meneliti bagi civitas akademika untuk meningkatkan jumlah dan mutu penelitian.

- d. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sinergis dengan program pendidikan dan penelitian serta relevan dengan kebutuhan masyarakat.

(Laporan Evaluasi Diri S-1 PGSD FIP UNY, 2003)

Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan kepada para *stakholder* program studi S-1 PGSD maka reevaluasi dan rekonstruksi struktur program baik pada tataran superstruktur maupun infrasturkturnya bisa dilakukan secara berkesinambungan. Dalam jangka pendek reevaluasi dan rekonstruksi kurikulum tersebut harus bermuara kepada tujuan penyelenggaraan program studi S-1 PGSD yaitu:

1. Menghasilkan pendidik pendidikan sekolah dasar yang memiliki kemampuan:
  - a) Pendidikan dasar-dasar kepribadian yang kokoh pada anak-anak;
  - b) Pembelajaran kemampuan dasar literasi sebagai alat untuk menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks);
  - c) Pengembangan keahlian secara kreatif, produktif, dan mandiri dalam sistem informasi yang ada di dalam masyarakat sehingga dapat menampilkan kinerja yang unggul sebagai pendidik.
- 2 Menghasilkan dan mengembangkan serta menerapkan ipteks pendidikan sekolah dasar yang berorientasi membantu mewujudkan manusia dan masyarakat madani Indonesia.

(Laporan Evaluasi Diri S-1 PGSD FIP UNY, 2003)

Dari upaya reevaluasi dan upaya rekonstruksi kurikulum program studi S-1 PGSD sebagaimana telah diungkap di atas, maka diharapkan para mahasiswa memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mantap. Kasus yang terjadi pada upaya pengembangan kurikulum S-1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta dilakukan dengan didasarkan pada tiga konsep dasar. Upaya tadi berusaha memadukan perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan dan teknologi serta prinsip-prinsip pendidikan kepribadian. Konsep dasar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendidik pendidikan sekolah dasar dituntut berkemampuan tinggi dalam pendidikan terpadu yang mengembangkan moral dan kepribadian anak sehingga cerdas secara *intelektual, moral, emosional, spiritual, sosial* dan *kultural*.
2. Pendidik pendidikan sekolah dasar juga harus memiliki kemampuan tinggi untuk bertugas di sekolah yang menerapkan azas manajemen pendidikan berbasis sekolah dan masyarakat.
3. Dalam implementasi kurikulum para calon sarjana pendidik pendidikan sekolah dasar akan mengalami proses pendidikan sehingga memiliki kemampuan tinggi dalam: (a) pengenalan dan pemahaman secara mendalam tentang karakteristik anak, (b) pemberian layanan pendidikan dan pembelajaran terpadu di sekolah dasar, (c) implementasi manajemen pendidikan sekolah dasar terpadu yang berbasis sekolah dan masyarakat.

Pada bagian lain, penyelenggaraan program studi S-1 PGSD membutuhkan kemitraan dengan semua pihak baik dalam konteks internal di lingkungan perguruan tinggi sendiri sebagaimana yang telah bisa berjalan maupun dengan pihak-pihak luar yang strategis bisa dilakukan. Antara lain dengan perusahaan (makanan, pakaian, alat permainan anak, jasa), perbankan, lembaga sosial masyarakat (LSM), sanggar-sanggar seni dan ketrampilan yang ada di masyarakat, perorangan, serta dengan pemerintah daerah yang selama ini telah/ pernah terjalin.

### Penutup

Dari paparan di atas pada akhirnya dapat diketahui bahwa penyelenggaraan program studi S-1 PGSD merupakan hal yang baru. Secara yuridis surat ijin penyelenggaraan program studi ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI sejak tanggal 3 April 2002 yakni surat Nomor: 827/D/T/2002. Sehingga sejak saat itulah pemerintah mulai mengijinkan kurang lebih sepuluh perguruan tinggi eks IKIP untuk terlibat dalam penyelenggaraan program studi S-1 PGSD.

Mengingat waktu penyelenggaraannya yang relatif masih belum lama dan masih muda, maka program studi S-1 PGSD ini masih memiliki aneka kendala antara lain adalah: *Pertama*, belum banyak memiliki dosen tetap yang bisa mendukung penuh terhadap penyelenggaraan program studi; *Kedua*, belum menjadi program studi

reguler seperti beberapa program studi lain; *Ketiga*, masih terbatasnya sarana dan prasarana misalnya adanya laboratorium yang memadai khusus untuk program studi ini, sanggar praktek ketrampilan, perpustakaan dengan koleksi yang memadai, dan aneka alat peraga pembelajaran yang kesemuanya masih belum menggembirakan.

*Keempat*, terbatasnya kegiatan proses belajar mengajar yang hanya bisa dilakukan pada waktu siang dan sore hari sehingga program-program dan aneka layanan yang dirancang untuk satu hari menjadi tidak bisa berjalan; *Kelima*, calon mahasiswa peserta program (*enrollment input*) S-1 PGSD masih sangat terbatas yakni hanya pada mereka yang sudah menjadi guru baik yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun sebagai guru yayasan; *Keenam*, sebagian masyarakat khususnya golongan menengah ke atas masih memandang sebelah mata; *Ketujuh*, seringnya kendala birokrasi dari instansi para mahasiswa berasal; *Kedelapan*, dukungan dari pemerintah daerah terutama dalam memberikan beasiswa SPP kepada mahasiswa masih rendah.

Dari kondisi tersebut mendorong penyelenggara untuk mencari terobosan-terobosan strategis dan membangun kemitraan kepada semua pihak baik dengan dengan perusahaan swasta (seperti: makanan, pakaian, alat permainan anak, jasa), perbankan, lembaga sosial masyarakat (LSM), sanggar seni dan ketrampilan yang ada di masyarakat, perorangan, serta dengan pemerintah daerah.

Pada bagian lain, penyelenggaraan program studi S-1 PGSD membutuhkan kemitraan dengan semua pihak baik dalam konteks internal di lingkungan perguruan tinggi sendiri sebagaimana yang telah bisa berjalan maupun dengan pihak-pihak luar yang strategis bisa dilakukan. Antara lain dengan perusahaan (makanan, pakaian, alat permainan anak, jasa), perbankan, lembaga sosial masyarakat (LSM), sanggar-sanggar seni dan ketrampilan yang ada di masyarakat, perorangan, serta dengan pemerintah daerah yang selama ini telah/ pernah terjalin.

### Penutup

Dari paparan di atas pada akhirnya dapat diketahui bahwa penyelenggaraan program studi S-1 PGSD merupakan hal yang baru. Secara yuridis surat ijin penyelenggaraan program studi ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI sejak tanggal 3 April 2002 yakni surat Nomor: 827/D/T/2002. Sehingga sejak saat itulah pemerintah mulai mengijinkan kurang lebih sepuluh perguruan tinggi eks IKIP untuk terlibat dalam penyelenggaraan program studi S-1 PGSD.

Mengingat waktu penyelenggaraannya yang relatif masih belum lama dan masih muda, maka program studi S-1 PGSD ini masih memiliki aneka kendala antara lain adalah: *Pertama*, belum banyak memiliki dosen tetap yang bisa mendukung penuh terhadap penyelenggaraan program studi; *Kedua*, belum menjadi program studi

reguler seperti beberapa program studi lain; *Ketiga*, masih terbatasnya sarana dan prasarana misalnya adanya laboratorium yang memadai khusus untuk program studi ini, sanggar praktek ketrampilan, perpustakaan dengan koleksi yang memadai, dan aneka alat peraga pembelajaran yang kesemuanya masih belum menggembirakan.

*Keempat*, terbatasnya kegiatan proses belajar mengajar yang hanya bisa dilakukan pada waktu siang dan sore hari sehingga program-program dan aneka layanan yang dirancang untuk satu hari menjadi tidak bisa berjalan; *Kelima*, calon mahasiswa peserta program (*enrollment input*) S-1 PGSD masih sangat terbatas yakni hanya pada mereka yang sudah menjadi guru baik yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun sebagai guru yayasan; *Keenam*, sebagian masyarakat khususnya golongan menengah ke atas masih memandang sebelah mata; *Ketujuh*, seringnya kendala birokrasi dari instansi para mahasiswa berasal; *Kedelapan*, dukungan dari pemerintah daerah terutama dalam memberikan beasiswa SPP kepada mahasiswa masih rendah.

Dari kondisi tersebut mendorong penyelenggara untuk mencari terobosan-terobosan strategis dan membangun kemitraan kepada semua pihak baik dengan dengan perusahaan swasta (seperti: makanan, pakaian, alat permainan anak, jasa), perbankan, lembaga sosial masyarakat (LSM), sanggar seni dan ketrampilan yang ada di masyarakat, perorangan, serta dengan pemerintah daerah.

### Daftar Pustaka

- Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Pengembangan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan Abad ke-21 (SPTK-21)*. Jakarta.
- Goodlad, John I. (1994). *Educational Renewal; Better Teachers, Better Schools*. San Francisco: Jossey-Bats Publishers.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/U/2002 tentang *Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi*.
- Orstein, Allan C. & Behar, Linda S. (1995). *Contemporary Issues in Curriculum*. Boston: Allyn and Bacon.
- Program Studi S-1 PGSD. (2003). *Laporan Evaluasi Diri*. Yogyakarta: FIP UNY.
- Schlechty, Phillip C. (1997). *Inventing Better Schools: An Action Plan for Educational Reform*. San Francisco: Jossey-Bats Publishers.
- Siegel, Peggy & Byrne Sandra. (1995). *Using Quality to Redesign School Systems*. San Francisco: Jossey-Bats Publishers.
- Suprodjo Pusposutardjo. (2002). *Analisis Kompetensi Guru SD Berdasarkan Pengelompokan Matakuliah dalam Kurikulum*. Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti.
- Toffler, Alvin Toffler. (1986). *The Third Wave*. New York: Mc. Grow-Hill.

